

ABSTRAK

ANALISIS PERBEDAAN ALOKASI ANGGARAN DAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:

LIYA HARMONIS

Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Akar dari permasalahan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan alam, sehingga akan merusak kualitas lingkungan hidup. Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, yaitu: tumpang tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dalam otonomi daerah dan kelemahan sistem perundangan dan hukum lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap besaran alokasi anggaran dan jumlah produk hukum daerah untuk lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sampel penelitian adalah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan 11 tahun pengamatan yaitu tahun 2005-2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap alokasi anggaran dan produk hukum daerah untuk lingkungan hidup sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini membuktikan bahwa cepatnya pemerintah dalam menangani dan merespon masalah lingkungan hidup, terbukti setelah dikelola oleh pemerintah, baik itu dari segi anggaran maupun produk hukum yang dihasilkan, menjadi lebih meningkat.

Kata Kunci: Alokasi Anggaran, Produk Hukum Daerah, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF DIFFERENCE BUDGET ALLOCATION AND LEGAL PRODUCTS OF MUNICIPAL GOVERNMENT IN LAMPUNG PROVINCE TO APPLICATION OF LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING THE PROTECTION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

By:
LIYA HARMONIS

Environmental management issues can be considered as one of the main causes of natural disasters in Indonesia. The roots of environmental problems is done without regard to the construction of the natural balance of factors, so it will damage the quality of the environment. There are several problems associated environmental management policy both central government and regions in Indonesia, namely: the overlap of environment management policy in autonomy and weaknesses of the legal and regulatory environment system .

This study aims to determine whether there is any significant difference to the amount of budget allocation and the number of local regulations for the environment at the District/Town in Lampung Province before and after the implementation of Law No. 32 of 2009. Samples are District/Town Governments in Lampung Province, with 11 years of observations in 2005-2015.

The results showed that there were significant differences on the budget allocations and local regulations on the environment before and after the implementation of Law No. 32 of 2009. This proves that the pace of government in addressing and responding to environmental issues, proven once run by the government, both in terms of the budget and the resulting legal product, be further increased.

Keywords: Budget Allocation, Regional Legal Products, Environment, Law No. 32 of 2009.